



RENJA **RENCANA KERJA** **TAHUN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO**

Daftar isi	ii
Daftar gambar	iii
Daftar tabel.....	iv
BAB I	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan hukum.....	3
1.3. Maksud dan tujuan rancangan rencana kerja.....	5
1.4. Sistematika penulisan	5
BAB II.....	7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD	7
2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD	25
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....	28
2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	34
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	55
BAB III.....	56
TUJUAN DAN SASARAN	56
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	56
3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD	58
3.3. Program dan kegiatan	59
BAB IV.....	86
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	86
BAB V.....	89
P E N U T U P	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses penyusunan RKPD dan renja SKPD	3
---	---



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi dan pencapaian renstra	8
Tabel 2.2 Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama	17
Tabel 2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat	20
Tabel 2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
Tabel 2.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	25
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja.....	26
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan.....	30
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	55
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	55
Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo wajib menyusun dokumen perencanaan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 pasal 84 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana strategis (Renstra) yang disusun mengacu pada rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program / kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain :

- a. Merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 yang bertema “Penguatan Ekonomi,Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing

Daerah “ untuk mencapai visi “Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing , Maju dan Sejahtera”.

- b. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas yang berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD
- c. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD
- d. Menjadi landasan penyusunan KUA PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD
- e. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas
- f. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut

:

- a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
- b. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
- c. Penyusunan rancangan Rencana Kerja
- d. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja
- e. Penetapan Rencana Kerja

Proses penyusunan RKPD dan Renja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD



1.2. Landasan Hukum

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Nomor 5475;
 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025

1.3. Maksud Dan Tujuan Rancangan Rencana Kerja

1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini dimaksudkan agar Program dan Kegiatan Tahun 2025 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 – 2025, serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo. Renja merupakan penjabaran dari rencana strategis untuk mewujudkan sinergitas dan keselarasan untuk menentukan arah kebijakan pada urusan administrasi kependudukan

2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) Tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA

Bab. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Capaian Program

Pelaksanaan program/kegiatan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan .

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana realisasi capaian kinerja dan mengidentifikasi permasalahan/kendala sehingga bisa digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Gambaran evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ sub kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023			Target program dan kegiatan 2024	Realisasi capaian program/kegiatan/sub keg.s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%) 2024
					Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi(%)			
1	Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar									
	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
		1.Rasio kepemilikan KIA	58,13	41,76	48,01	50,29	104,75	53,07		
		2.Rasio kepemilikan KTP el	100	99,4	100	99,44	99,44	100		
	Kegiatan									
1.1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
	sub.kegiatan									
	1.Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk								

	2.Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ sub kegiatan s/d tahun 2022	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan 2024	Realisasi capaian program/kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target rencana (%)
					Target 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi(%)			
1.2.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sub.kegiatan									
1.2.1	1.Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk								
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									

		1.Rasio kepemilikan akta kematian	57,49	91,70	48,89	100	204,5 4	53,19		
		2.Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	80	100	70	79,99	114,2 7	75		
		3.Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	90	93,73	84	98,21	116,9 2	86		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/ sub kegiatan s/d tahun 2022	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan 2024	Realisasi capaian program/kegiatan/ sub keg.s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					Target 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi(%)			
	Kegiatan									
2.1.	Pelayanan pencatatan sipil									
	sub kegiatan									
2.1.1	1.Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Targe t Kiner ja Capai an Progr am	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/s ub kegiatan s/d tahun 2022	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiata n 2024	Realisasi capaian program/k egiatan/su b keg.s/d tahun 2024	Tingk at capai an realis asi targe t renst ra (%)
			2025		Target 2023	Realis asi Renja 2023	Tingk at Realis asi(%)			
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
		1.Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	20	100	10	100	1000	15		
		2.Persentase cakupan updating data kependudukan	80	100	53,33	100	187,51	66,67		
		3.Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100	100	100	100	100	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/s sub kegiatan s/d tahun 2022	target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022			Target program dan kegiatan 2023	Realisasi capaian program/kegiatan/sub keg.s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra
					Target 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi			
	Kegiatan									
3.1.	Pengumpulan data kependudukan,dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan									
	sub kegiatan									
3.1.1	1.Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan								
3.1.2	2.Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan								

	3. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah									
3.2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya pengelolaan informasi administrasi kependudukan									



Mendasarkan pada data diatas, dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan, realisasi pada tahun 2023 seluruhnya sudah mencapai kategori sangat tinggi. Hal ini didukung adanya koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah pengampu urusan pada tingkat Kabupaten Wonosobo, Kecamatan maupun Pemerintah Desa.

Apabila dibandingkan dengan target dan capaian nasional, maka capaian beberapa indikator dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA),

Secara nasional, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan 50% ,sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 48,01% dan realisasi 50,29%. Dengan demikian , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo mampu mencapai target baik di kabupaten maupun secara nasional. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelayanan terintegrasi melalui inovasi Balateka (Bayi Lahir dapat Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA). Permohonan pembuatan Akta Kelahiran usia 0-60 hari akan mendapatkan Akta Kelahiran sekaligus Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dengan semakin banyak sekolah yang mengajukan permohonan pembuatan KIA untuk siswa secara kolektif.
3. Pelayanan KIA sudah bisa dilakukan di seluruh kecamatan se Kabupaten Wonosobo.

Meskipun sudah melampaui target, tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terus mengupayakan peningkatan capaian demi tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Kabupaten Wonosobo. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan KIA sebagai identitas bagi anak, selain itu masyarakat juga belum mengetahui manfaat nyata dari kepemilikan KIA. Hal ini masih menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan juga untuk menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat ,misalnya mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta atau dengan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan prioritas pelayanan atau pemberian benefit bagi

pemilik KIA . hal ini penting demi mensukseskan target kinerja sekaligus memberikan beragam manfaat bagi masyarakat

2) Rasio kepemilikan KTP

Secara nasional, cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik tahun 2023 ditargetkan 99,4% dan tercapai 99,44% ,melampaui target nasional sebesar 0,04%. Sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 100% dan tercapai 99,44%. Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo lebih tinggi dibandingkan target secara nasional dan diharapkan pada tahun 2023 seluruh warga Kabupaten Wonosobo sudah melakukan perekaman KTP Elektronik. Akan tetapi capaian di Kabupaten Wonosobo masih belum mencapai target sepenuhnya . Hal ini dikarenakan Mobilitas penduduk yang tinggi dan banyaknya penduduk yang tinggal di luar domisili administrasi kependudukan.Mobilitas penduduk menjadi tantangan yang harusdiimbangi dengan pendataan penduduk yang memadai. Upaya yang sudah dilakukan antara lain melakukan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah dan wilayah di kabupaten Wonosobo.

3) Rasio kepemilikan Akta Kematian

Untuk meningkatkan capaian penerbitan Akta Kematian , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selain meningkatkan sosialisasi juga selalu berkoordinasi dengan admin desa untuk melaporkan peristiwa kematian dalam Buku Pokok Pemakaman sekaligus melampirkan persyaratan penerbitan Akta Kematian. Selain itu juga didukung oleh layanan website yang dioperasionalkan oleh petugas admin desa/kelurahan.

4) Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, pengertian Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial. Termasuk didalamnya Orang terlantar dan Komunitas terpencil. Dalam hal penduduk rentan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan administrasi

kependudukan bagi korban bencana alam, penyandang disabilitas , pengidap ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrim (desil 1). Dengan kriteria tersebut, di Kabupaten Wonosobo terdapat penduduk rentan sejumlah 160.879 orang, dan sudah terlayani administrasi kependudukan dalam hal kepemilikan Nomor Induk kependudukan (NIK) sejumlah 128.683 orang atau sebesar 79,99% yang telah melampaui target RPJMD yaitu 75%.

5) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Secara nasional, cakupan akta kelahiran tahun 2023 ditargetkan 98% , Sedangkan di Kabupaten Wonosobo ditargetkan 84% dan tercapai 98,21%. Dapat diketahui bahwa target di Kabupaten Wonosobo lebih rendah dibandingkan dengan target nasional. Capaian di Kabupaten Wonosobo telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini bisa dicapai dengan adanya sinergi yang baik yang diwujudkan dalam pelayanan yang terintegrasi.

6) Persentase peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan

Pada tahun 2023 jumlah perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo bertambah 4 (empat) perangkat daerah sehingga menjadi 8 (delapan) perangkat daerah, yaitu :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Disdukcapil dengan Perangkat Daerah Lain Tahun 2023

N O	INSTANSI	TANGGAL PKS	NOMOR PKS/MOU/ KOMITMEN	TENTANG
1	RSUD	29-12-2021	470/1450/Disdukcapil/2021 019./1992/XII/RSUD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
2	BPPKAD	29-12-2021	470/1451/Disdukcapil/2021 470/1919/BPPKAD/2021	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
3	DINKES	12-03-2021	470/262/Disdukcapil	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran anak/ bayi Usia 1

			440/512/Dinkes	sampai dengan 60 hari, KK dan KIA
4	DPPKBPPP A	13-06- 2022	470/677/Disdukcapil/2022 445/478.e/2022/DPPKBPPP A	Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Layanan Publik
5	PENGADIL AN AGAMA	20-04- 2022	W11- A8/1208/HM.01.1/4/2022 134.3/06/NK/2022	Nota Kesepakatan Bersama Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah kabupaten Wonosobo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan
		16-05- 2023	W11- A8/1358/HM.01.1/V/2023 470/1178/Disdukcapil/V/2 023	Komitmen Besama Pelayanan "Pohon Kaktus Teratai" (Permohonan Perubahan Status Terjadi Karena Cerai)
6	PT POS INDONESIA A (PERSERO) CABANG WONOSOB O	13-09- 2023	775/Bisratket/Penjualan/4/ 0923 470/2228/Disdukcapil	PKS tentang Pelayanan Pengiriman Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		13-09- 2023	776/Bisratket/Penjualan/4/ 0923 470/2229/Disdukcapil	Komitmen Bersama Layanan "Dokkar Salman" (Dokumen Kependudukan Kami Antar Sampai Alamat Dengan Aman)
7	KEMENAG	06-11- 2023	134.3/NK/23/2023 B.0940/Kk.11.07/HM.01.2/ 11/ 2023	Addendum atas NK Nomor 134.4/08/NK/IV/2022, Nomor 1558/Kk.11.07/01/PP.00/0 8/2022 antara Pemkab Wonosobo dan Kantor Kemenag Kabupaten Wonosobo tentang Sinergi Penyelenggaraan Layanan Keagamaan di Kabupaten Wonosobo
		06-11- 2023	B3392/Kk.11.07/HM.01.2/1 1/2023	Komitmen Bersama Layanan "Pelaminan" (Pelayanan

			470/2678/Disdukcapil	Administrasi Kependudukan Paska Perkawinan)
8	DPUPR	21-12-2023	470/4055/Disdukcapil/2023 050/5486/DPUPR/2023	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Layanan Publik

7) Persentase cakupan updating data kependudukan

Hasil cakupan updating data kependudukan diperoleh dari jumlah kecamatan yang diperbarui dibandingkan dengan jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo selalu melayani permohonan pembaruan data penduduk untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo melalui petugas operator pelayanan di kecamatan. Jadi bisa dikatakan bahwa capaian cakupan updating data kependudukan adalah 100% (seratus persen) karena sudah melayani permohonan pembaruan data untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

8) Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses

Sesuai Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terdapat 28 (dua puluh delapan) jenis data agregat kependudukan dan seluruhnya bisa diakses.

9) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penting untuk mengukur sejauh mana penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan. Pada tahun 2023 pengumpulan data survei menggunakan aplikasi SKM Wonosobo sesuai arahan dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 060/0575/Org yang mengatur mengenai kewajiban pengumpulan data SKM secara digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada akhir tahun 2023 mendapatkan nilai 89,53 termasuk dalam kategori "Sangat Baik", lebih tinggi dari target kinerja pada Renstra yaitu 83, dan meningkat dibandingkan pada tahun 2022

yang mendapatkan nilai 83,79 juga termasuk dalam kategori ‘Sangat Baik’.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.3

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN WONOSOBO
TRIWULAN III (OKTOBER - NOVEMBER) TAHUN 2023**

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN	NILAI TOTAL NRR TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN SETELAH DIKONVERSI
1	Persyaratan	3,615	90,37
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,692	92,30
3	Waktu Penyelesaian	3,423	85,57
4	Biaya/Tarif	3,846	96,15
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,538	88,45
6	Kompetensi Pelaksana	3,500	87,50
7	Perilaku Pelaksana	3,615	90,37
8	Sarana dan Prasarana	3,231	80,77
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,765	94,22
	Jumlah Nilai Total NRR tertimbang per unsur pelayanan	3,580	
	Nilai NRR setelah dikonversi		89,53
	Mutu Pelayanan	A	
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik	

Berdasarkan analisis terhadap hasil survei atas kinerja penyelenggaraan layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dapat ditarik suatu penjabaran umum pada sembilan unsur yang menjadi ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bahwa nilai unsur terendah terdapat pada unsur kedelapan atau sarana dan prasarana dengan nilai 3,231, diikuti unsur ketiga yakni waktu penyelesaian dengan nilai 3,423 dan unsur kelima dan keenam atau kompetensi pelaksana dengan nilai 3,500.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sarana prasarana, waktu penyelesaian, produk pelayanan dan kompetensi pelaksana menjadi 4 unsur yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap semua unsur lainnya terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

Kebutuhan yang diprioritaskan adalah kebijakan mengarah pada perbaikan Sarana dan Prasarana. Dalam rangka optimalisasi sarana dan prasarana dalam pemenuhan pelayanan perlu adanya penganggaran yang berbasis data sehingga pemanfaatan anggaran tersebut bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan responden melalui saran dan masukan maupun aduan dari pengguna layanan.

10) Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2023 adalah 71,80 atau predikat “BB”. Penilaian ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang sangat baik pada dua per tiga unit kerja, baik utama maupun pendukung. Nilai yang diperoleh lebih tinggi dari target Renstra yaitu 66,42, dan meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memperoleh nilai 71,33.

TABEL 2.4
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

No	Aspek	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Nilai Total
			Keberadaa n (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaata n (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,40	6,30	10,50	22,2 0
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,0 0
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,70	3,15	5,25	11,1 0
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	5,25	8,75	17,5 0

Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	15,80	21,00	35,00	71,80
-----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

B. Alokasi Pendanaan

Guna mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk Program kegiatan sebesar Rp 6.976.551.510,-. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp 6.361.027.621,- atau 91,18 %. Rencana Pendapatan daerah sebesar Rp. 300.000.000,- dapat terealisasi Rp. 174.085.000,- atau 58,03 %. Pendapatan tidak memenuhi target karena berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan dokumen kependudukan maka sejak 1 Juni 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tidak diperkenankan melakukan pungutan denda retribusi lagi.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 sebesar Rp 5.290.029.735 dapat direalisasikan sebesar Rp 4.701.090.785 atau 88,87 %. Prioritas program ini adalah mendukung pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui pengadaan sarana dan prasarana pencetakan dokumen kependudukan, seperti ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yaitu alat yang dapat mencetak KIA secara langsung, dan peralatan pencetakan lainnya seperti PC (Personal Computer) dan printer. Selain itu juga untuk pengadaan peralatan zoom meeting untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang secara rutin diadakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kegiatan Dukcapil Belajar maupun rapat lainnya secara daring.

2) Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan pada masyarakat. Alokasi anggaran Program Pendaftaran Penduduk pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.481.521.775 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.464.097.806 atau 98,82%.

Program ini dilaksanakan melalui:

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Output kegiatan ini adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagai Operator cetak dokumen administrasi kependudukan dan pengadaan bahan komputer untuk pencetakan KTP dan KIA yaitu ribbon evolis dan ribbon fargo.
2. Pendekatan layanan kepada masyarakat dalam bentuk Kegiatan jemput bola perekaman KTP el di sekolah, kampung /perumahan dan pelayanan bagi penduduk rentan.

Pencetakan KTP di Kabupaten Wonosobo selama 1 tahun pada tahun 2023 sebanyak 66.625 keping. Sedangkan pencetakan KIA dalam satu tahun tercetak sebanyak 18.131 keping.

Kegiatan pelayanan jemput bola perekaman KTP el selama tahun 2023 dilaksanakan pada 48 sekolah SLTA (MA, SMK dan SMA) di Kabupaten Wonosobo dengan hasil perekaman KTP el sebanyak 3.020 perekaman.

3. Pengelolaan arsip dokumen kependudukan dan catatan sipil melalui digitalisasi arsip untuk kemudahan ketika dibutuhkan.
- b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Output kegiatan ini adalah Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk. Kegiatan ini diikuti oleh petugas pelayanan administrasi kependudukan sebagai persiapan pengembangan sistem layanan berbasis website .

3) Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan sosialisasi terkait pencatatan sipil. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas, menyatukan pemahaman dan persepsi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sasaran kegiatan sejumlah 300 orang meliputi Petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Desa/kelurahan se kabupaten Wonosobo.

Alokasi anggaran pada Program Pencatatan Sipil tahun 2023 sebesar Rp 60.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.311.100,00 atau 98,92 %.

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan. Capaian program meliputi meningkatnya persentase cakupan updating data kependudukan, ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral, juga untuk meningkatkan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan. Program dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Output kegiatan ini adalah

1. Buku Profil Kependudukan tahun 2023 (lembar kerja tahun 2022) dan aplikasi Galeri Kependudukan. Buku Profil Kependudukan Kabupaten Wonosobo memberikan gambaran Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Wonosobo berdasarkan agregat data dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari Direktorat Jenderal Adminduk semester 2 tahun 2021 dan tahun 2022 serta dari pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun Galeri Kependudukan menyajikan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil per semester sesuai pelaporan semester.

2. Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemutakhiran data penduduk yang menghasilkan Kartu Keluarga dan KTP dengan data kependudukan yang sudah diperbarui. Apabila ada anggota keluarga yang sudah meninggal akan diterbitkan Akte Kematian .

b. Fasilitasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di dalam kantor Disdukcapil dan seluruh kecamatan se kabupaten Wonosobo supaya pelayanan administrasi kependudukan berjalan lancar.

Alokasi anggaran pada Program-Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2023 sebesar Rp. 145.000.000. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp. 143.527.930 atau 97.32%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam tabel 2.2

Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 2.5
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	Jumlah yang memiliki KTP berbasis Nik : Jumlah Wajib KTP x 100 %	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran : Jumlah penduduk usia 0-18 tahun x 100 %	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Terpenuhinya Layanan penunjang untuk pertumbuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Dinas

Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional*	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2	n-1	n	n+1	n-2	n-1	Tahun n	n+1	
	Program Pendaftaran Penduduk											*target nasional 2023 disamakan 2024
1	Rasio kepemilikan KIA	50		42.95	48.01	53.07	58.13	41.76	50,29	53	58	
2	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	99.4		100	100	100	100	99,44	99,44	99,5	99,6	
	Program Pencatatan Sipil											
1	Rasio kepemilikan akta kematian			44.58	48.89	53.19	57.49	91.7	100	53	57	secara nasional :1. target ketersediaan Buku Pokok Pemakaman di desa/kecamatan yaitu 75%.2.penerbitan akte kematian 100% dari pelaporan yang sesuai.
2	Persentase penduduk			65	70	75	80	100	79,99	75	80	

[illegible]

	akta Perkawinan											
2	Penerbitan Akta Perceraian							8				
3	Penyajian data kependudukan							2				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

Memperhatikan Arah Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Wonosobotahun 2025 maka isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dalam hal “ Tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik” dengan prioritas pada optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah melalui perwujudan pemerintah yang kapabel melalui peningkatan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan adalah fondasi yang memastikan pemerintah mampu berjalan dengan efisien, adil dan bertanggung jawab. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah prinsipnya adalah sebuah upaya mewujudkan pemerintahan yang kapabel, menguatkan transparansi informasi publik, pengelolaan komunikasi publik serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu adanya implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Program prioritas yang akan dilakukan adalah :

1. Layanan integratif administrasi kependudukan

Dilakukan dengan optimalisasi inovasi yang sudah ada dan menggali potensi inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi kependudukan

Mengupayakan kemudahan dan keleluasaan untuk kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Selain itu juga memenuhi kebutuhan data sektoral yang terintegrasi untuk pembangunan daerah.

3. Penguatan pelayanan administrasi kependudukan secara daring kepada masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan saat ini belum terlaksana secara optimal, karena masyarakat masih terbiasa dengan pelayanan secara langsung bertatap muka dengan petugas. Selain itu juga terus memaksimalkan perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara masif.

4. Mengupayakan sarana dan prasarana dan pembangunan gedung kantor yang representatif dan layak untuk pelayanan publik

Gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada dipandang masih belum cukup memadai sebagai tempat pelayanan publik. Belum adanya ruang khusus untuk konsultasi dan pengaduan masyarakat, luasan parkir yang minim dan menyulitkan akses pemohon yang membutuhkan pelayanan. Selain itu Ruang penyimpanan dokumen juga belum memadai yang bisa menimbulkan risiko rusak/hilang dokumen. Ruang pengelolaan data yang terbatas sehingga mengganggu pelaksanaan pekerjaan para petugas. Selain itu belum ada kamar mandi yang terpisah bagi pemohon laki-laki dan wanita sesuai arahan yang disampaikan lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah perlengkapan perekaman KTP-el yang mobile yang mudah dibawa ketika diperlukan, alat pencetakan (printer) KTP el dan printer dokumen biasa

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi dengan baik.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Kependudukan

No.	Urusan	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik yang belum optimal	1. Lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di desa/kelurahan belum berperan secara optimal untuk mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan
			2. Kapasitas sumber daya manusia/petugas pelayanan yang belum sesuai harapan masyarakat
			3. Pemahaman masyarakat akan pelayanan berbasis teknologi informasi masih harus terus ditingkatkan .
			4. Pemanfaatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang belum maksimal.
			5. Sarana prasarana pelayanan yang belum memadai
		Belum maksimalnya pemanfaatan data oleh perangkat daerah dan lembaga	Pemberian akses data oleh Kemendagri masih belum sesuai yang diharapkan.

			Kebijakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpusat, sehingga daerah tidak bisa mengolah data sendiri dan harus menunggu data turun dari pengelola data pemerintah pusat;
--	--	--	--

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi penghambat dalam pencapaian visi dan misi maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan tersebut meliputi:

- Pelayanan berbasis teknologi informasi masih belum familiar di masyarakat sehingga menimbulkan persepsi pada sebagian masyarakat bahwa pengurusan administrasi kependudukan itu tidak mudah. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang pada akhirnya bisa menurunkan capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah yang bisa menurunkan persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan.
- Ruang pelayanan yang ada dipandang belum nyaman dan representatif, sehingga mempengaruhi kenyamanan pemohon .
- Penduduk masih enggan mengurus dokumen administrasi kependudukan apabila belum dibutuhkan.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

➤ Tantangan

1. Kemajuan teknologi dan informasi dalam menunjang pelayanan secara daring
2. Mobilitas penduduk yang tinggi
3. Integrasi data kependudukan dengan pelayanan publik lain
4. Kemanfaatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
5. Regulasi dari pusat terkait sertifikat ISO 27001 tentang Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk perlindungan dan keamanan informasi
6. Meningkatkan pemahaman penduduk akan pentingnya tertin administrasi kependudukan.
7. Ketersediaan agregat data kependudukan yang bermanfaat untuk pembangunan daerah.
8. Ketersediaan data yang valid terkait kriteria penduduk tertentu yang diampu perangkat daerah lain yang datanya akan diolah oleh Disdukcapil untuk keperluan kebijakan pembangunan daerah
9. Koordinasi intensif dengan lembaga kemasyarakatan di desa dan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya administrasi kependudukan kepada penduduk
10. Potensi inovasi yang semakin memudahkan pelayanan untuk masyarakat.

➤ Peluang

1. Kepengurusan dokumen administrasi kependudukan tidak dipungut biaya
 2. Kerjasama dengan instansi/lembaga lain
 3. Sosialisasi kepada masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan
 4. Pencetakan Dokumen kependudukan selain secara mandiri menggunakan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)
 5. Mensikapi perkembangan teknologi informasi dengan memanfaatkannya untuk peningkatan pengelolaan penyimpanan (arsip) dokumen kependudukan dengan Digitalisasi Arsip
- Memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah lainnya untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan

- Jemput Bola ke tempat-tempat tertentu seperti sekolah, pondok pesantren dan kantor ;
- Peningkatan kompetensi bagi petugas pelayanan administrasi kependudukan sampai ke desa/kelurahan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan dan gedung kantor yang representatif.

c. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:

1. Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan yang memadai
3. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
4. Mendorong peningkatan perekaman Identitas Kependudukan Digital;
5. Peningkatan kualitas data kependudukan ;
6. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait;
7. Perlunya kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pemanfaatan langsung dokumen administrasi kependudukan dalam pelayanan publik bagi masyarakat
8. Mengintensifkan pelayanan administrasi kependudukan di desa.

Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut :

- Peningkatan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik

- Memprioritaskan layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi
- Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi kependudukan
- Selalu koordinasi dengan pusat terkait penerapan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dalam rangka implementasi layanan administrasi kependudukan digital dan teknis pengajuan Perjanjian Kerjasama yang mudah dan aman;
- Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah ;
- Koordinasi secara intensif dengan desa dalam rangka kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat
- Mengupayakan kerjasama dengan pihak swasta atau badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan benefit bagi pemilik dokumen kependudukan
- Penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
- Mendorong perangkat daerah untuk segera memenuhi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

- Hasil analisis kebutuhan tahun 2025 menunjukkan penambahan angka yang cukup besar terutama pada sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan karena adanya rencana pengadaan kendaraan dinas yang baru mengingat kondisi kendaraan dinas yang ada sudah beberapa kali mengalami kerusakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan keamanan data/informasi dan mengikuti arahan Dirjen kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, pada tahun 2025 ada penambahan sub kegiatan yaitu Pengadaan Aset tak Berwujud sebagai langkah persiapan pemenuhan sertifikasi standar keamanan informasi / keamanan siber .
- Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sebagai berikut

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Wonosobo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana(Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1.Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota				7.699.034.374,-	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				6.695.787.227,-	
	1.1Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				6.000.000,-	1.1Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				6,000,000	

	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonos obo	Jumlah dokume n Perenca naan Perangk at Daerah	3	3.000.000,-	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wonos obo	Jumlah dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	3	3,000,000	
--	--	--------------	---	---	-------------	--	--------------	--	---	-----------	--

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosobo	Jumlah laporan evaluasi Kinerja	5	3.000.000,-	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wonosobo	Jumlah laporan evaluasi Kinerja	5	3,000,000	
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.866.034.374,-	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.062.287.227,-	
	1.1.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Wonosobo	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23	4.866.034.374,-	1.1.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Wonosobo	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23	5.062.287.227,-	

	1.3 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				520.000.000,-	1.3 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah				519.997.500,-	
--	---------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------------------------------	--	--	--	---------------	--



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Wonosobo	jumlah Pket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	4.000.000,-	1.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Wonosobo	jumlah Pket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	4.000.000,-	
	1.1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Wonosobo	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	1	195.000.000,-	1.1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Wonosobo	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan	1	195.000.000,-	
	1.1.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Wonosobo	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg	1	40.000.000,-	1.1.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Wonosobo	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yg di	1	39.997.500,-	

			di sediakan					sediakan			
--	--	--	-------------	--	--	--	--	----------	--	--	--

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lok	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.1.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Wonosobo	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1	3.000.000,-	1.1.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Wonosobo	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	1	3.000.000	
	1.1.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	wilayah Indonesia	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1	275.000.000,-	1.1.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	wilayah Indonesia	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1	275.000.000	

			asi SKPD					si SKPD			
	1.1.6 dukungan Pelaksanaan SPBE	Wonosobo	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	1	3.000.000,-	1.1.6 dukungan Pelaksanaan SPBE	Wonosobo	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	1	3.000.000	



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.4 Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Wonosobo			1.234.000.000,-	1.4 Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Wonosobo			217.000.000,-	
	1.1.1 Pengadaan Peralatan mesin dan lainnya	Wonosobo	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		784.000.000,-	1.1.1 Pengadaan Peralatan mesin dan lainnya	Wonosobo			142.000.000,-	
	1.1.2 Pengadaan kendaraan dinas operasional	Wonosobo	jumlah unit kendaraan dinas yg disediakan	1	350.000.000,-	1.1.2 Pengadaan kendaraan dinas operasional	Wonosobo	jumlah unit kendaraan dinas yg disediakan	1	0	

	1.1.3. Pengadaan aset tak berwujud	Wonosobo	Jumlah Sistem Operasi yang disediakan	1	100.000.000,-	1.1.3. Pengadaan aset tak berwujud	Wonosobo	Jumlah Sistem Operasi yang disediakan	1	75.000.000,-	
--	---------------------------------------	----------	---------------------------------------	---	---------------	---------------------------------------	----------	---------------------------------------	---	--------------	--

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				788.000.000,-	1.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				646.300.000,-	
	1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Wonosobo	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	3.000.000,-	1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Wonosobo	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	5.000.000,-	
	1.1.2 penyediaan jasa komunikasi,SDA, dan Listrik	Wonosobo	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,SDA dan	12	150.000.000,-	1.1.2 penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Wonosobo	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,SDA dan	12	150.000.000,-	

			listrik yg di sediaka n					listrik yg di sediakan			
	1.1.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Wonos obo	jumlah laporam penyedi aan jasa pelayan an umum yang di sediaka n	12	635.000.000,-	1.1.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Wonos obo	jumlah laporam penyedia an jasa pelayana n umum yang di sediakan	12	491.300.000,-	



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.6 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Wonosobo			285.000.000,-	1.6 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Wonosobo			244.202.500,-	
	1.6.1 penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Wonosobo	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayar kan pajak dan perizina nnya	20	90.000.000,-	1.1.1 penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Wonosobo	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayark an pajak dan perizinan nya	20	149.202.500,-	
	1.6.2 pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan	Wonosobo	jumlah gedung kantor dan bangunan	2	150.000.000,-	1.1.2 pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan	Wonosobo	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	2	50.000.000,-	

	lainnya		lainnya yg di pelihara .di rehabilit asi			lainnya		yg di pelihara. di rehabilita si			
No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting



	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	1.6.3 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Wonosobo	jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara /di rehabiloitasi	2	20.000.000,-	1.1.3 Pemeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Wonosobo	jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/di rehabiloitasi	2	20.000.000,-	
	1.6.4 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara /di rehabiloitasi	30	25.000.000,-	1.1.4 Pemeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/di rehabiloitasi	30	25.000.000,-	
	2. Program pendaftaran penduduk				1.485.000.000,-	2. Program pendaftaran penduduk				1.065.000.000,-	
	2.1 Pelayanan Pendaftaran	Wonosobo			1.335.000.000,-	2.1 Pelayanan Pendaftaran penduduk	Wonosobo			915.000.000,-	

penduduk										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	2.1.1 peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Wonosobo	Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk		1.170.000.000,-	2.1.1 peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Wonosobo	jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk		915.000.000,-	
	2.2 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk				150.000.000,-	2.2 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk				150.000.000,-	
	2.1.1 bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Provinsi Jawa Tengah	jumlah laporan bimtek terkait pendaftaran penduduk	1	150.000.000,-	2.1.1 bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Provinsi Jawa Tengah	jumlah laporan bimtek terkait pendaftaran penduduk	1	150.000.000,-	

			uk								
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	3. Program pencatatan sipil				225.000.000,-					185.000.000,-	
	3.1 Pelayanan pencatatan Sipil				115.000.000,-	3.1 Pelayanan pencatatan Sipil				125.000.000,-	
	3.1.1 pencatatan , penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Wonosobo	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas		75.000.000,-	3.1.1 pencatatan , penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Wonosobo	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa		60.000.000,-	

			pelapor an peristiwa penting					penting			
	3.1.2 pengadan dokumen ke[penduduk an selain blanko ktp el,formulir dan buku terkait pencatatn sipil sesuai dengan kebutuhan	Wono sobo			30.250.00 0,-	3.1.2 pengadan dokumen ke[pendudukan selain blanko ktp el,formulir dan buku terkait pencatatn sipil sesuai dengan kebutuhan	Wonosob o			25.000.0 00	
	3.1.3 peningkatan pelayanan pencatatn sipil	Wonos obo	peningk atan cakupa n kepemil ikan akte pencata tn sipil	46	40.000.00 0,-	3.1.3 peningkatan dalam pelayana n pencatatn sipil	Wonosob o	peningkata n cakupan kepemilika n akte pencatatn sipil	46	40.000.0 00,-	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	3.2 penyelenggaraan pencatatan sipil	Wonosobo			110.000.000,-	3.2 penyelenggaraan pencatatan sipil	Wonosobo			60.000.000,-	
	3.1.1 fasilitasi terkait pencatatan sipil	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	terfasilitasinya pencatatan sipil	12	35.000.000,-	3.1.1 fasilitasi terkait pencatatan sipil	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	terfasilitasinya pencatatan sipil	12	0,-	
	3.1.2 sosialisasi terkait pencatatan sipil	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1	75.000.000,-	3.1.2 sosialisasi terkait pencatatan sipil	Provinsi Jawa Tengah dan Jakarta	jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	1	60.000.000,-	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	4. Program pengelolaan informasi adminitrsai kependudukan				240.000.000,-	4. Program pengelolaan informasi adminitrsai kependudukan				130.149.360,-	
	4.1 pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan				170.000.000,-	4.1 pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan				95.149.360,-	
	4.1.1 pengolahan dan penyajian data kependudukan	Wonosobo	jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan		75.000.000,-	4.1.1 pengolahan dan penyajian data kependudukan	Wonosobo	jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan		40.000.000,-	

	4.1.2 Kerjasama pemanfaatan data kependuduka n	Won oso bo	jumlah dokume n kerjasa ma pemanf aatan data kepend udukan	3	25.000.00 0,-	4.1.2 Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Wonosob o	jumlah dokumen kerjasama pemanfaat an data kependud ukan	3	15.149. 360,-.	
	4.1.3 inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Won oso bo	jumlah laporan hasil inventar isasi	1	70.000.00 0,-	4.1.3 inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Wonosob o	jumlah laporan hasil inventaris asi	1	40.000. 000,-	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	target capaian	kebutuhan dana(Rp.000)	
	5.1 penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				70.000.000,-	5.1 penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				35.000.000,-	
	5.1.1 fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Wonosobo	jumlah laporan hasil fasilitasi penbgelolaan informasi administrasi kependudukan	12	70.000.000,-	5.1.1 fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Wonosobo	jumlah laporan hasil fasilitasi penbgelolaan informasi administrasi kependudukan	12	35.000.000,-	
	JUMLAH				9.649.034.374,-					8.075.936.587,-	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Masyarakat bisa menyampaikan usulan dengan mengisi kuesioner pada Survey Kepuasan Masyarakat .

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Wonosobo	Gedung kantor pelayanan yang representatif	1 unit	-

Masyarakat menilai bahwa gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo kurang representatif, ruang tunggu dan tempat parkir kurang luas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

8.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan kondisi jumlah penduduk Indonesia yang besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana program nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Paradigma baru dalam pembangunan Indonesia tidak hanya melalui reformasi saja, tetapi harus melakukan transformasi menyeluruh dengan menyatukan semua elemen bangsa bergotong royong menuju Negara Nusantara Berdaulat, maju dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas dituangkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan , yaitu : 1.Transformasi Sosial, 2,Transformasi Ekonomi,3.Transformasi Tata Kelola, 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan 6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan, 7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta 8. Kesenambungan Pembangunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan misi ke tiga, yaitu Transformasi Tata Kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Transformasi tata kelola antara lain difokuskan pada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan pengembangan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yaitu pelayanan melalui website .

Telaah kebijakan nasional tentang Administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan

diperkuat Permendagri Nomor 62 tahun 2008 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan dokumen kependudukan, agar setiap penduduk terjamin hak-hak nya sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitas sebagai penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.

Prioritas pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2020-2024 adalah secara kebijakan RPJMN 2020-2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada Prioritas Nomor 3 yaitu “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada tiga strategi yaitu: (1) penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial, (2) peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta (3) penguatan karakter dan kebudayaan.

Dari prioritas tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah “ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
- d. Peningkatan Kapasitas SDM ;

e. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Sesuai arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri maka fokus pelayanan Administrasi Kependudukan adalah pelayanan yang membahagiakan Masyarakat, yang dilaksanakan dengan perbaikan kualitas pelayanan melalui pelayanan secara daring, pelayanan yang cepat dan mudah.

8.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional, Program SKPD, RPJP Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021 – 2026 dan Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

B.1. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

B.2. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

B.3. Target Indikator Kinerja Tahun 2025:

1. Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak : 58,13 %
2. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK : 100 %
3. Rasio kepemilikan akta kematian : 57,49%
4. Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen : 80 %
5. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran : 90 %
6. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan : 20 %
7. Persentase cakupan updating data kependudukan : 80 %
8. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses : 100 %.
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat : 84
10. Nilai SAKIP : 84,5

8.3. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan dalam 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Terdiri dari kegiatan:

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

1.1.2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.2. Administrasi keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.3.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.3.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.3.4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

1.3.6. Dukungan pelaksanaan SPBE.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah

1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.4.2. Pengadaan aset tak berwujud
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan jasa surat menyurat
 - 1.5.2. Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik
 - 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 1.6.2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 1.6.3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan kantor
 - 1.6.4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- 2. Program pendaftaran Penduduk;
 - 2.1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2.1.1. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
 - 2.2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
 - 2.2.1. Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk.
- 3. Program Pencatatan Sipil
 - 3.1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 3.1.1. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
 - 3.1.2. Pengadaan dokumen kependudukan, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan.
 - 3.1.3. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil.
 - 3.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

3.2.1. Fasilitas terkait pencatatan sipil

3.2.2. Sosialisasi terkait pencatatan sipil.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

4.1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian database kependudukan

4.1.1. Pengolahan dan penyajian data kependudukan

4.1.2. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

4.1.3. Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah.

4.2. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

4.2.1. Fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.



Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Wonosobo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATAT AN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARG ET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBE R DANA		TARG ET CAPAI AN KINER JA	KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF
1	2	3		4	8	9	10	11	14	15	16
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.075.936.587,-					8.480.287.227,-
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.075.936.587,-					8.480.287.227,-

	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.075.936.587,-					8.480.287.227,-
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Nilai IKM 2. Nilai Evaluasi SAKIP 3. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik 4. Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja 5. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 6. Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan	1. 1.84 2. 70,64 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100%	6.695.787.227,-	Kab. Wonosobo	APBD	-		6.895.287.227,-

				RKPD							
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1. Nilai IKM 2. Nilai SAKIP	1.84 2.70,64	6.000.000,-	Kab. Wono sobo	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. IK M;84,5 2. SA KIP:72,47	12.000.000,-
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 kali Dokumen	3.000.000,-	Kab. Wono sobo, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. IKM ;84,5 2. SAK IP:72,47	6.000.000,-
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Tersedianya laporan capaian kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	5 kali Laporan	3.000.000,-	Kab. Wono sobo, Semu	PENDAP ATAN ASLI DAERAH	-	1. IKM ;84,5 2. SAK IP:72,4	6.000.000,-

			ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusuna n laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			a Keca matan , Semu a Kel/D esa	H (PAD)		7	
2.12.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudn ya pelaksanaa n administras i keuangan	Terbayarkann ya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	14 kali Orang /bula n	5.062.287.2 27-			-	14 kali Orang /bulan	5.062.287.2 27-	
2.12.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Tersediany a gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali Orang /bula n	5.062.287.2 27-	Disdu kcapil	DAU Tambah an Dukung an Pendana anAtas	-	14 kali Orang /bulan	5.062.287.2 27,-	

								Kebijaka n Penggaji an Pegawai Pemerin tah Dengan Perjanjia n Kerja			
2.12.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudny a pelaksanaa n adminstras i umum perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perkantoran	100%	519.997.50 0,-	Disdu kcapil	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	100%	560.000.000 ,-	
2.12.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Tersedianya komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	1 Paket	6.000.000,-	
2.12.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.000.000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	220.000.000,-
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.997.500,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	50.000.000,-
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Dokumen	3.000.000,-
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

			Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan Laporan	275.000.000,-	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, dan wilayah Indonesia	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 bulan Laporan	275.000.000,-
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
			Terlaksananya dukungan pelaksanaan SPBE	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.000.000,-	Kab. Wonosobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6.000.000,-

2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terrealisasinya Belanja Pengadaan BMD penunjang Urusan Pemerintah daerah	1.BMD yang diperoleh sesuai kebutuhan 2.Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100%	217.000.000,-	Disdukcapil	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100%	250.000.000,-
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	217.000.000,-	Kab. Wonosobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10 unit	250.000.000,-
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terealisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan perkantoran penunjang kinerja	100%	646.300.000,-	Disdukcapil	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	100%	666.000.000,-
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.000.000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 laporan	6.000.000,-
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Tersedianya jasa komunikasi ,SDA dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan Laporan	150.000.000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 bulan Laporan	150.000.000,-
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan Laporan	491.300.000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 bulan Laporan	510.000.000,-
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terlaksananya pemeliharaan BMD	Persentase aset perangkat daerah dalam	100%	244.202.500,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH	-	100%	345.000.000,-	

		Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemda	kondisi baik				H (PAD)			
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Tersedianya jasa pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	149.202.500-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	20 unit	175.000.000,-
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	50.000.000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 unit	75.000.000,-
2.12.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

0											
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi(Tabung pemadam kebakaran, mebelair,printer,komputer,A C,Home Use, dll)	6 Unit	20.000.000,-	Kab. Wono sobo, Semu a Keca matan	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	30 unit	45.000.000,-
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi (Pagar, kanopi,tempat	2 paket	25.000.000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	3 paket	50.000.000,-

				parkir)							
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkat nya kualitas pelayanan pendaftara n penduduk	1. Rasio kepemilikan KIA 2. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK 3. Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusa n dokumen kependuduka n	1).58, 13% 2).10 0% 3).80 %	1.065.000. 000,-	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		1) .63, 18% 2) 100 % 3) 100 %	1.090.000.0 00,-

2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	1. Rasio kepemilikan KIA 2. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK 3. Prosentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen kependudukan	1).58,13% 2).100% 3).80%	915.000.000,-	Kab. Wonosobo, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1).63,18% 2) 100% 3) 100%	915.000.000,-
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
		Meningkatnya pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 bulan Laporan	915.000.000,-	Kab. Wonosobo, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 bulan Laporan	915.000.000,-

	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Pendaftaran Penduduk	Meningkat nya kualitas pelayanan pendaftara n penduduk	1. Rasio kepemilikan KIA 2. Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK 3. Prosent ase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen kependuduka n	1).58, 13% 2).100 % 3).80 %	150.000.00 0,-	Jawa Tenga h&DI Y	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	1) .63,1 8% 2) 100 % 3) 100 %	175.000.000 ,-
	2.12.02.2.04.000 3	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk									
			Terlaksana nya Bimbingan Teknis terkait Pendaftara n Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Lapo ran	150.000.00 0,-	Jawa Tenga h&DI Y	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	1) .63,1 8% 2) 100 % 3) 100 %	175.000.000 ,-
3 ,	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkat nya kualitas layanan pencatatan	1. Rasio kepemilikan akta kematian 2. Presentase	1) . 57,49 % 2).90	185.000.00 0,-	Kab. Wono sobo, Semu a	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		2) . 61,80 % 2).100	275.000.00 0,-

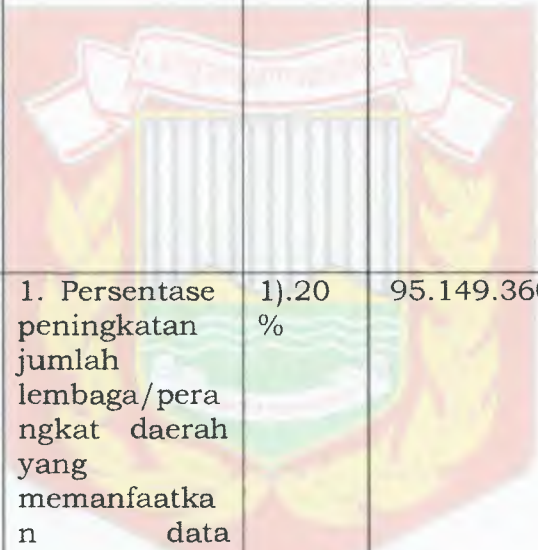
			sipil	anak yang memiliki akte kelahiran (usia 0-18tahun) 3. Presentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen kependudukan	% 3).80 %		Kecamatan, Semu a Kel/D esa		% 3).100 %	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Rasio kepemilikan akta kematian 2. Presentase anak yang memiliki akte kelahiran (usia 0-18tahun) 3. Presentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen kependudukan	1).57, 49% 2).90 % 3).80 %	125.000.000,-	Kab. Wono sobo, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) 61,80 % 2).100 % 3).100 %	190.000.000,-

				n							
2.12.03. 2.01.000 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting										
		Terlaksana nya Pencatatan, Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Doku men	60.000.000,- -	Kab. Wono sobo,	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	1 Doku men	75.000.000,-	
2.12.03. 2.01.000 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil										

			Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 bulan Layanan	40.000.000,-	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	12 bulan Layanan	65.000.000,-
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan										
			Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	25.000.000,-	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1 Paket	50.000.000,-

2.12.03.2.02	Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Meningkat nya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Rasio kepemilikan akta kematian 2. Presentase anak yang memiliki akte kelahiran (usia 0- 18tahun) 3. Presentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam kepengurusan dokumen kependuduka n	1).57, 49% 2).90 % 3).80 %	60.000.000,-	Kab. Wono sobo, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	4) 61,80 % 2).100 % 3).100 %	85.000.000,-
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil									
		Tersosialis asinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Lapor an	60.000.000,-	Kab. Wono sobo, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	1 Lapora n	85.000.000,-

							esa				
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan 2. Persentase cakupan updating data kependudukan 3. Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang	1).20 % 2).80 % 3).10 0%	130.149.360,-	Kab. Wonosobo, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1) .30 % 2) 100 % 3) 100 %	220.000.000,-	

				dapat diakses						
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyajian informasi kependudukan		1. Persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan 2. Persentase cakupan updating data kependudukan 3. Persentase ketersediaan	1).20 % 2).80 % 3).100 %	95.149.360,-	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1) .30 % 2) 100 % 3) 100 %	160.000.000,-

				agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses							
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan										
			Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	40.000.000,-	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2 Dokumen	65.000.000-
2.12.04.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan										

2.01.000 2											
			Terlaksana nya Kerja Sama Pemanfaata n Data Kependudu kan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependuduka n	4 Doku men	15.149.360, -	Kab. Wono sobo, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	6 Doku men	30.000.000,-
2.12.04. 2.01.000 3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah										
			Terlaksana nya Inventarisa si Data untuk Kepentinga n Pembangun an Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Lapor an	40.000.000, -	Kab. Wono sobo, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	1 Lapora n	65.000.000,-

							esa					
2.12.04.2.03	Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkat nya inovasi pelayanan dan kerjasama pemanfaata n data kependudu kan	1. Jumlah penerbitan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data 2. Persentase ketersediaan agregat data kependuduka n untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	1) .10 PKS 2) 10 0%	35.000.000,- -	Kab. Wono sobo, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	1) .13 PKS 2) 100 %	60.000.000,-		
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											

			Terfasilitas inya Pengelolaan Informasi Administra si kependudu kan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	1 Lapor an	35.000.000,-	Kab. Wono sobo, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	1 Lapora n	60.000.000,-
			J U M L A H			8.075.936. 587,-					8.480.287.2 27,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kerangka pendanaan memuat seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja. Perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Rencana program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dijabarkan dalam enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan belas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pemerintahan pilihan dan lima unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan non urusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo memiliki program:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai indikator rata-rata indeks kepuasan masyarakat

2. Program Pendaftaran Penduduk;

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio kepemilikan kartu identitas anak (usia 0-16 tahun) dan rasio kepemilikan KTP berbasis NIK.

3. Program Pencatatan Sipil;

Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio kepemilikan akta kematian, persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen dan persentase anak yang memiliki akte kelahiran.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan, persentase cakupan updating data kependudukan, persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses



TABEL SIPD

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan tahun ke 4 dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021 – 2026 , disusun dengan memperhatikan dan menelaah kebijakan nasional dan isu yang berkembang tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 . Dengan disusunnya RENJA ini diharapkan kedepan pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan.

RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama, terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya RENJA ini maka :

1. RENJA ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
3. RENJA ini akan menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2024;
4. RENJA ini akan dijadikan langkah awal perencanaan penyusunan RKA Tahun 2025.
5. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, transparan dan akuntabel.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat .

Wonosobo, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO



TARJO, S.Sos, M.Si
Pemuda Utara Muda
NIP. 196508071986071001

